



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Sekumpul Ujung Desa Bincau 70714 Telp/Fax 0511-4721719/4722291
Martapura, Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANJAR

NOMOR : 100.3.5.4/ 460 /DPRKPLH/2025

Tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANJAR

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 4 Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjar;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1252);
7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1282);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4) Tanggal 22 September 2025

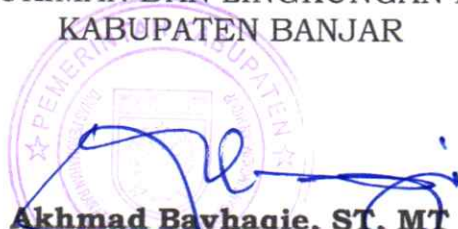
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR, TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR

- KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, rencana aksi pencapaian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Indikator Kinerja Utama bagi Pejabat Struktural Eselon III dan IV, Fungsional dan Pelaksanan tercantum dalam Lampiran II dan III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Martapura
Pada Tanggal : 22 September 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANJAR


Akhmad Bayhaqie, ST, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690909 199703 1 013

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANJAR

NOMOR : 100.3.5.4 / 460 / DPRKPLH / 2025

TANGGAL : 22 September 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Definsi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Kumulatif nilai IP air pada titik-titik pemantauan	Σ /Persentase status IP air x bobot) 100 - ((50 + 0,9) x (PU - 0,1)) Note : PU adalah Indeks Pencemar Udara PU = 50% INDEKS SO2 + 50% INDEKS NO2	Kepala Dinas	Lingkungan Hidup (Bidang P2KLH /Bidang P3KLH/ Bidang PSLB3)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Defnisi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Data kualitas lahan yang menjadi tupoksi Pemerintah Daerah yaitu data Taman Kehati, RTH, dan Tutupan vegetasi relevan lainnya yang memiliki SK penetapan dan telah didelineasi, selebihnya perolehan datanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat	$IKL = 100 - ((84,3 - ((LTL / LW - DKK) \times 100)) \times 50 / 54,3)$ IKL : Indeks Kualitas Lahan LTL : Luas Tutupan Hutan; 60% luas belukar dan belukar rawa pada Kawasan Hutan dan Fungsi Lindung. Ruang Terbuka Hijau (hutan kota, taman kota), kebun raya, dan taman keanekaragaman hayati (kehati) serta rehabilitasi hutan dan lahan LW : Luas Wilayah DKK : Dampak Kebakaran dan Kanal Pada Lahan Gambut		
2	Meningkatnya Kualitas Permukiman	Persentase Permukiman Layak Huni	Permukiman Layak Huni adalah permukiman yang memenuhi standar pelayanan PSU, yang meliputi Rumah Layak Huni yang didukung Akses jalan, Drainase Lingkungan, Air Minum, Sanitasi, Pengelolaan Persampahan, dan Penerangan Jalan Umum	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Permukiman Layak Huni}}{\text{Jumlah Permukiman Kabupaten}} \times 100\%$		Urusan Perumahan Kawasan Permukiman (Bidang Kawasan Permukiman / Bidang Penyediaan Perumahan)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Defnisi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah ukuran capaian kinerja akuntabilitas instansi pemerintah daerah yang dievaluasi setiap tahun oleh Kementerian PANRB melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan tingkat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program/kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan, serta evaluasi kinerja perangkat daerah.</p>	<p>Skor/nilai hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah oleh Kementerian PANRB, dalam rentang 0-100 (dengan kategori: A, BB, B, CC, C).</p>	Sekretariat	

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANJAR




Akhmad Bayhaqie, ST, MT
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19690909 199703 1 013

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
 PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN BANJAR

NOMOR : 100.3.5.4 / 460 / DPRKPLH / 2025

TANGGAL : 22 September 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEJABAT ESELON III DAN IV
 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 TAHUN 2025

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Defnisi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
Urusan Lingkungan Hidup						
1	Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran/dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Lokasi Badan Air yang Memenuhi Baku Mutu	Persentase Jumlah Titik Pantau Badan Air Yang Dilakukan Uji Mutu Memenuhi Setidaknya 50% Dari Parameter Baku Mutu	(Jumlah Titik Pantau Badan Air Yang Dilakukan Uji Mutu Memenuhi Baku Mutu ÷ Jumlah Total Titik Pantau Badan Air) x 100%	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	BIDANG P2KLH
		Persentase Lokasi Udara Ambien Memenuhi Baku Mutu	Persentase Jumlah Titik Pantau Udara Ambien Yang Dilakukan Uji Mutu Memenuhi Setidaknya 50% Dari Parameter Baku Mutu	(Jumlah Titik Udara Ambien Yang Dilakukan Uji Mutu Memenuhi Baku Mutu ÷ Jumlah Titik Pantau Udara Ambien) x 100%	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	BIDANG P2KLH

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Definsi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
2	Meningkatnya Pemantauan Kualitas Air dan Udara	Parameter Air yang Dipantau	Parameter Baku Mutu Udara Ambien sesuai dengan Lampriran VII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada titik pantau yang telah ditentukan di Tahun Berjalan	Parameter Air yang Dipantau (38)	Kepala Seksi Pemantauan Dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	BIDANG P2KLN
		Parameter Udara Ambien yang Dipantau		Parameter Udara yang Dipantau (3)	Kepala Seksi Pemantauan Dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	BIDANG P2KLN
3	Meningkatnya Pembinaan Komunitas Kampung Iklim	Jumlah Komunitas Kampung Iklim Yang Dibina	Desa/Kelurahan yang mengikuti komunitas untuk iklim (Proklim)	Jumlah Komunitas Kampung Iklim Yang Dibina	Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan	BIDANG P2KLN
4	Terlaksananya Penyusunan Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Jumlah Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Terlaksananya Penyusunan Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Jumlah Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan	BIDANG P2KLN
5	Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Pelaksanaan pengelolaan laboratorium lingkungan, pelaksanaan pengujian sampel dari instansi pemerintah bidang lingkungan hidup dan instansi lainnya yang dapat ditanggung oleh APBD dan sampel dari dunia industri/dunia usaha, pengujian kualitas udara dan uji kualitas lingkungan, operasional laboratorium, termasuk kegiatan untuk	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Kepala UPTD - Lab Lingkungan	BIDANG P2KLN

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Definsi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
			peningkatkan mutu atau standarisasi laboratorium lingkungan			
6	Menurunnya Sampah yang Dibuang Ke TPA	Persentase Sampah Dibuang Ke TPA	Berkurangnya Jumlah Sampah yang Dibuang Ke TPA	Jumlah Sampah yang dibuang ke TPA : JumlahTimbulan sampah Kabupaten	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3	BIDANG PSLB3
7	Sampah Yang Tertangani Melalui Pemrosesan Akhir Sampah	Jumlah Sampah Yang Tertangani Melalui Pemrosesan Akhir Sampah	Sampah Yang Tertangani Melalui Pemrosesan Akhir Sampah	Jumlah Sampah Yang Tertangani Melalui Pemrosesan Akhir Sampah	Kepala UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah	BIDANG PSLB3
8	Optimalnya Fungsi Lembaga Pengelolaan Sampah	Persentase Kelembagaan Pengelolaan Sampah yang Aktif	-Lembaga pengelolaan sampah yang dioptimalkan terdiri dari BSI, BSU dan KSM -variable 30 merupakan jumlah total lembaga yg belum aktif karena adanya berbagai faktor kendala dalam pelaksanaannya	((Jumlah Total lembaga pengelolaan sampah yang terbentuk-jumlah Total lembaga sampah yang belum aktif)/Jumlah Total lembaga sampah keseluruhan) x 100 %	Kepala Seksi Kemitraan Pengelolaan Sampah	BIDANG PSLB3

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Definsi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
9	Meningkatnya Kesadaran Rumah Tangga Dalam Pengelolaan Sampah	Persentase Rumah Tangga Sebagai Nasabah Lembaga Pengelolaan Sampah	-Meningkatnya jumlah Rumah Tangga Sebagai Nasabah Lembaga Pengelolaan Sampah - Jumlah Rumah Tangga sasaran yang dimaksud adalah jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan	$\left(\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Sebagai Nasabah Lembaga Pengelolaan Sampah} / \text{Jumlah rumah tangga sasaran}}{\text{Jumlah rumah tangga sasaran}} \right) \times 100\%$	Kepala Seksi Kemitraan Pengelolaan Sampah	BIDANG PSLB3
10	Optimalnya Pengurangan Sampah	Persentase Sampah Yang Dikurangi	Meningkatnya jumlah pengurangan sampah	$\left(\frac{\text{Jumlah Sampah Yang Dikurangi} / \text{Jumlah Timbulan Sampah}}{\text{Jumlah Timbulan Sampah}} \right) \times 100\%$	Kepala Seksi Pengelolaan Sampah	BIDANG PSLB3
11	Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3	Persentase Pelaku Usaha Yang Mengelola Limbah B3 Dengan Baik	Pelaku Usaha yang Mengelola Limbah B3 dengan Baik dapat ditentukan dengan memastikan pelaku usaha tersebut memiliki izin/persetujuan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3. Dengan adanya izin/persetujuan tersebut dapat dipastikan pelaku usaha telah memiliki MoU atau kerja sama dengan pihak pengangkut/transporter limbah B3 yang memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku yang akan melakukan pengelolaan limbah B3 lebih lanjut. Sampai dengan tahun 2024, jumlah pelaku usaha yang mengelola limbah B3 dengan baik yaitu sebanyak 50 pelaku usaha. Jumlah	<p>(Jumlah Pelaku Usaha yang Mengelola Limbah B3 dengan Baik s.d. tahun 2024 + Jumlah Pelaku Usaha yang Mengelola Limbah B3 dengan Baik tahun ke n) / Jumlah Pelaku Usaha yang Berpotensi sebagai Penghasil Limbah B3 * 100%</p> <p>keterangan: target jumlah pelaku usaha yang mengelola limbah B3 dengan baik setiap tahunnya yaitu 15 pelaku usaha tahun 2025 : $(50 + (15)) / 140 * 100\% = 46,43\%$ tahun 2026 : $(50 + (15+15)) / 140 * 100\% = 57,14\%$ tahun 2027 : $(50 + (15+15+15)) / 140 * 100\% = 67,86\%$ tahun 2028 : $(50 + (15+15+15+15)) / 140 * 100\% = 78,57\%$ tahun 2029 : $(50 + (15+15+15+15+15)) / 140 * 100\% = 89,29\%$</p>	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3	BIDANG PSLB3

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Definsi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
			pelaku usaha yang berpotensi sebagai penghasil limbah B3 yang terdata yaitu sebanyak 140 pelaku usaha.			
12	Meningkatnya Pelaku Usaha Yang Memiliki Rincian Teknis dan/atau Persetujuan Teknis	Persentase Pelaku Usaha Yang Memiliki Rincian Teknis dan/atau Persetujuan Teknis	Meningkatnya Pelaku Usaha Yang Memiliki Rincian Teknis dan/atau Persetujuan Teknis	Jumlah Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3 yang Telah Memiliki Rincian Teknis dan/atau Persetujuan Teknis s.d. tahun n / Jumlah Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3 Yang Terdata * 100	Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	BIDANG PSLB3
13	Meningkatnya Pelaku Usaha Yang Melaporkan Pengelolaan Limbah B3	Persentase Pelaku Usaha Yang Melaporkan Pengelolaan Limbah B3	Meningkatnya pelaku usaha yang melaporkan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan	Jumlah pelaku usaha yang melaporkan pengelolaan limbah B3 s.d. tahun ke n / Jumlah pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 yang terdata * 100%	Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	BIDANG PSLB3

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Definsi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
14	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Pengelolaan Lingkungan	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Pengelolaan Lingkungan	Tingkat Pelanggaran Pelaku Usaha Yang Di Awasi Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	(Total Pelaku Usaha Yang Diawasi- Total Pelaku Usaha Yang Taat) / Total Pelaku Usaha Yang Di Awasi) x 100 %	Kepala Bidang Penataan, Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	BIDANG P3KLLH
15	Tersusunnya Dokumen Persetujuan Lingkungan sesuai dengan Perundangan	Persentase Dokumen Persetujuan Lingkungan yang sesuai dengan Perundangan	Dokumen Persetujuan Lingkungan merupakan dokumen yang menjadi dasar bagi pelaksanaan suatu kegiatan atau usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dokumen ini diperlukan sebagai syarat dalam proses perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	(Jumlah Dokumen Persetujuan Lingkungan Yang Sesuai Dengan Perundangan dibagi Jumlah Dokumen Yang dikeluarkan Persetujuan Lingkungannya) x 100 %	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan	BIDANG P3KLLH
16	Meningkatnya Pengawasan dan/atau Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pelaku Usaha	Persentase Pelaku Usaha Yang Dilakukan Pengawasan dan/atau Penegakan Hukum	Pelaku Usaha Yang Ditargetkan Untuk Dilakukan Pengawasan Dalam Setahun	(Total Pelaku Usaha Yang Dilakukan Pengawasan /Total Pelaku Usaha Yang Menjadi Target Pengawasan) x 100 %	Kepala Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa Dan Penegakan Hukum Lingkungan	BIDANG P3KLLH
17	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Pengelolaan Lingkungan	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Pengelolaan Lingkungan	Tingkat Pelanggaran Pelaku Usaha Yang Di Awasi Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	(Total Pelaku Usaha Yang Diawasi- Total Pelaku Usaha Yang Taat) / Total Pelaku Usaha Yang Di Awasi) x 100 %	Kepala Bidang Penataan, Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	BIDANG P3KLLH

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Definsi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
18	Meningkatnya Penanganan Pengaduan	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	Pengaduan Lingkungan Hidup Yang Ditindak Lanjuti	$\left(\frac{\text{Pengaduan Yang Ditindak Lanjuti}}{\text{Total Pengaduan Yang Masuk}} \right) \times 100\%$	Kepala Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa Dan Pengakuan Hukum Lingkungan	BIDANG P3KLH
19	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Evaluasi Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan Hidup Yang Tersedia	Mengukur seberapa banyak dokumen evaluasi lingkungan yang telah disusun dan lengkap dari total dokumen yang seharusnya dibuat.	$\text{Persentase evaluasi lingkungan} = \left(\frac{\text{Jumlah dokumen evaluasi yang lengkap}}{\text{Total dokumen evaluasi yang wajib dibuat}} \right) \times 100\%*$	Kepala Bidang Penataan, Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	BIDANG P3KLH
20	Tersedianya Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Yang Terencana	Dokumen RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk jangka waktu tertentu.	Dokumen Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Yang Terencana	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan	BIDANG P3KLH
21	Terselenggaranya Kajian Hidup Lingkungan Strategis	Persentase Dokumen KLHS Yang Tersedia	Dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) adalah dokumen yang berisi analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif mengenai dampak lingkungan dari suatu kebijakan, rencana, atau program (KRP). KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan	(Jumlah Dokumen KLHS yang tersedia di bagi jumlah permohonan KLHS yang masuk) X 100%	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan	BIDANG P3KLH

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Defnisi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
			berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan KRP.			
22	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan	Persentase Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan	Persentase Partisipasi Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan adalah persentase masyarakat sasaran yang terdiri atas masyarakat adat dan sekolah yang terlibat aktif dalam minimal satu kegiatan peduli lingkungan hidup (salah satunya dapat termasuk GBPLH, sosialisasi lingkungan, atau sebagainya) pada tahun berjalan, dibandingkan dengan total masyarakat sasaran.	$\left(\frac{\text{Jumlah Masyarakat Sasaran yang Mengikuti Kegiatan}}{\text{Total Masyarakat Sasaran}} \right) \times 100\%$	Kepala Bidang Penataan, Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	BIDANG P3KLN
23	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Pembentukan Masyarakat Hukum Adat	Terbentuknya Masyarakat Hukum Adat	Terpenuhinya Persyaratan Masyarakat Adat untuk Mendapatkan Pengakuan Dari Pemerintah Daerah Menjadi Masyarakat Hukum Adat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Profil 2. Peta Wilayah Adat 3. Peraturan Daerah Terkait MHA 4. Peraturan Bupati Banjar Terkait Tata Cara Pengakuan 5. Peraturan Bupati Banjar Penetapan Masyarakat Hukum Adat 	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	BIDANG P3KLN

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Definisi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
24	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan	Persentase Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan	Persentase Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan adalah persentase masyarakat sasaran yang terdiri atas masyarakat adat dan sekolah yang terlibat aktif dalam minimal satu kegiatan peduli lingkungan hidup (salah satunya dapat termasuk GBPLH, sosialisasi lingkungan, atau sebagainya) pada tahun berjalan, dibandingkan dengan total masyarakat sasaran.	$\left(\frac{\text{Jumlah Masyarakat Sasaran yang Mengikuti Kegiatan}}{\text{Total Masyarakat Sasaran}} \right) \times 100\%$	Kepala Bidang Penataan, Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	BIDANG P3KLLH
25	Meningkatnya Pembinaan Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah	Persentase Sekolah Yang Terbina	Jumlah sekolah yang sudah terbina mengenai gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup	$\left(\frac{\text{Jumlah Sekolah yang terbina pada tahun (n)}}{\text{Jumlah Sekolah yang direncanakan mendapatkan pembinaan pada tahun (n)}} \right) \times 100\%$	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	BIDANG P3KLLH
26	Meningkatnya Tutupan Lahan	Persentase Tutupan Lahan	Luas Tutupan Lahan Perkotaan = Luas RTH / Luas Kecamatan Martapura Kota	$\left(\frac{\text{Luas Ruang Terbuka Hijau}}{\text{Luas Kecamatan Martapura Kota}} \right) \times 100\%$	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	BIDANG P2KLLH
27	Meningkatnya Pengelolaan Lahan Keanekaragaman Hayati	Luas Lahan Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Meningkatnya pengelolaan Taman Kehati 7.82 Ha	Peningkatan pengelolaan taman keanekaragaman hayati	Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Dan Pemeliharaan Lingkungan	BIDANG P2KLLH

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Definsi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
28	Meningkatnya Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	Luas Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	Penanaman Di Ruang Terbuka Hijau	Luas Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	BIDANG P2KHLH
29	Meningkatnya Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	Persentase Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	Pemeliharaan Tanaman Ruang Terbuka Hijau	(Ruang Terbuka Hijau Yang Dipelihara/Total Ruang Terbuka Hijau) x 100%	Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Dan Pemeliharaan Lingkungan	BIDANG P2KHLH
30	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau Yang Terbangun & Terpelihara Di Kabupaten	Terlaksananya Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Sesuai yang Direncanakan Serta Terpeliharanya Seluruh Ruang Terbuka Hijau Yang Sudah Ada Di Kabupaten	(RTH Terbangun Sesuai Rencana dan Terpelihara/Ruang Terbuka Hijau yang Telah Direncanakan) x 100%	Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Dan Pemeliharaan Lingkungan	BIDANG P2KHLH
31	Meningkatnya Kelengkapan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal	Perumahan Adalah Jumlah Rukun Tetangga yang Ada Di Kabupaten Banjar Kelengkapan PSU Adalah : Tersedianya Jalan, Drainase, TPS, Air Bersih dan Sanitasi	(Jumlah RT yang Memenuhi Kelengkapan PSU Minimal di Perumahan + Jumlah RT yang Memenuhi Kelengkapan PSU Minimal di Perumahan Kumbuh / Jumlah RT di Kabupaten Banjar) x 100%	Kepala Bidang Penyediaan Perumahan	BIDANG PENYEDIAAN PERUMAHAN
32	Meningkatnya Kualitas Jalan Lingkungan Perumahan Sesuai Standar	Persentase Titik Jalan Lingkungan Perumahan Sesuai Standar	Jalan Lingkungan Perumahan dalam Kondisi Optimal	(Jumlah Jalan Lingkungan Perumahan Optimal / Total Jalan Lingkungan Perumahan) x 100%	Kepala Seksi Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan	BIDANG PENYEDIAAN PERUMAHAN
33	Meningkatnya Kualitas Drainase Perumahan Sesuai Standar	Persentase Titik Drainase Perumahan Sesuai Standar	Drainase Perumahan dalam Kondisi Optimal	(Jumlah Drainase Perumahan Optimal / Total Drainase Perumahan) x 100%	Kepala Seksi Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan	BIDANG PENYEDIAAN PERUMAHAN

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Defnisi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
34	Meningkatnya Kelengkapan PJU Perumahan	Jumlah Tiik PJU yang Dipelihara Dan Pasang Baru	Tertaksananya kerja sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan yang dilaksanakan	Kepala Seksi Keterpaduan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum Permukiman	BIDANG KAWASAN PERUMAHAN
35	Meningkatnya Serah Terima PSU oleh Pengebang Ke Pemerintah Daerah	Persentase PSU yang Diserahterimakan	Ratio jumlah penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan yang telah diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah terhadap jumlah PSU Perumahan	(Jumlah PSU Perumahan yang telah diserahkan / Jumlah PSU Perumahan keseluruhan) x 100	Kepala Seksi Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan	BIDANG PENYEDIAAN PERUMAHAN
36	Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	Persentase Rumah layak huni yang dilakukan perbaikan yang berada diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha	((Jumlah Rumah di Kab. Banjar - Jumlah RTL + Jumlah RTLH yang ditangani) / Jumlah Kab Banjar) x 100	Kepala Bidang Penyediaan Perumahan	BIDANG PENYEDIAAN PERUMAHAN
37	Tertanganinya Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah	Persentase Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Yang Tertangani	Tertanganinya Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah	(Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani padaa tahun n / Jumlah Total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n) x 100	Kepala Seksi Penyediaan Perumahan Swadaya	BIDANG PENYEDIAAN PERUMAHAN
38	Tertanganinya Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah	Persentase Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Yang Tertangani	Tertanganinya Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah	(Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani padaa tahun n / Jumlah Total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n) x 100	Kepala Seksi Penyediaan Perumahan Swadaya	BIDANG PENYEDIAAN PERUMAHAN
39	Meningkatnya Perumahan Yang Dibangun Sesuai Siteplan	Persentase Perumahan Yang Dibangun Sesuai Dengan Siteplan	Perumahan Yang Melaksanakan Pembangunan Baik Rumah Maupun PSU nya Sesuai Siteplan Yang Telah Disahkan	(Perumahan yang Sedang Dibangun Sesuai dengan Siteplan / Total Perumahan yang Sedang Dibangun) / 100%	Kepala Seksi Penyediaan Perumahan Umum Dan Komersil	BIDANG PENYEDIAAN PERUMAHAN

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Definsi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
40	Meningkatnya Kelengkapan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal	Perumahan Adalah Jumlah Rukun Tetangga yang Ada Di Kabupaten Banjar Kelengkapan PSU Adalah : Tersediannya Jalan, Drainase, TPS, Air Bersih dan Sanitasi	(Jumlah RT yang Memenuhi Kelengkapan PSU Minimal di Perumahan + Jumlah RT yang Memenuhi Kelengkapan PSU Minimal di Perumahan Kumuh / Jumlah RT di Kabupaten Banjar) x 100%	Kepala Bidang Kawasan Perumahan	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
41	Tersediannya Dokumen Perencanaan Penanganan Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penanganan Perumahan	Tersediannya Data & Dokumen Perencanaan Penanganan Kawasan Perumahan Kumuh	Jumlah Dokumen	Kepala Seksi Pendataan Dan Perencanaan Kawasan Perumahan	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
42	Meningkatnya RTLH yang Diangani Sesuai Standar	Persentase RTLH yang Diangani Sesuai Standar	Persentase Rumah tidak layak huni yang dilakukan perbaikan yang berada diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha	(Jumlah RTLH yang ditangani / Jumlah RTLH Kab Banjar) x 100 %	Kepala Seksi Penyediaan Perumahan Swadaya	BIDANG PENYEDIAAN PERUMAHAN
43	Meningkatnya Kualitas Jalan Lingkungan Perumahan Sesuai Standar	Persentase Titik Jalan Lingkungan Perumahan Sesuai Standar	Jalan Lingkungan Perumahan dalam Kondisi Optimal	(Jumlah Jalan Lingkungan Perumahan Optimal / Total Jalan Lingkungan Perumahan) x 100%	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
44	Meningkatnya Kualitas Drainase Perumahan Sesuai Standar	Persentase Titik Drainase Perumahan Sesuai Standar	Drainase Perumahan dalam Kondisi Optimal	(Jumlah Drainase Perumahan Optimal / Total Drainase Perumahan) x 100%	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
45	Meningkatnya Kelengkapan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal	Perumahan Adalah Jumlah Rukun Tetangga yang Ada Di Kabupaten Banjar Kelengkapan PSU Adalah : Tersediannya Jalan, Drainase, TPS, Air Bersih dan Sanitasi	(Jumlah RT yang Memenuhi Kelengkapan PSU Minimal/Jumlah RT di Kabupaten Banjar) x 100%	Kepala Bidang Penyediaan Perumahan	BIDANG PENYEDIAAN PERUMAHAN

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Definsi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
46	Meningkatnya RTLH yang Ditangani Sesuai Standar	Persentase RTLH yang Ditangani Sesuai Standar	Persentase Rumah tidak layak huni yang dilakukan perbaikan yang berada diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha	(Jumlah RTLH yang ditangani / Jumlah RTLH Kab Banjar) x 100 %	Kepala Seksi Penyediaan Perumahan Swadaya	BIDANG PENYEDIAAN PERUMAHAN
47	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Pembangunan Rumah Sesuai Standar	Persentase Masyarakat yang Memahami Standar Permukiman Layak	Masyarakat Sasaran Merupakan Masyarakat yang Hadir dalam Kegiatan Sosialisasi Terkait Penayadaran Publik Terhadap Pencegahan Tumbuh Kembang Permukiman Kumuh	(Jumlah Masyarakat Sasaran Yang Memahami Tujuan & Maksud Kegiatan / Jumlah Masyarakat Sasaran Yang Hadir Dalam Kegiatan) x 100%	Kepala Seksi Pendataan Dan Perencanaan Kawasan Permukiman	BIDANG PENYEDIAAN PERUMAHAN
Sekretariat						
48	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	(Total Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah + Target Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah) X Nilai Penimbang	Sekretaris	SEKRETARIAT
49	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Pemenuhan Seluruh Kegiatan Perencanaan	(Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun / Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Ditargetkan) x 100%	Kasubbag Perencanaan	SEKRETARIAT
50	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan sesuai ketentuan	Pemenuhan Seluruh Kegiatan Keuangan Perangkat Daerah	(Dokumen Pelaporan dan Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun / Dokumen Pelaporan dan Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah Di Targetkan) x 100%	Kasubbag Keuangan dan Aset	SEKRETARIAT

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Defnisi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
51	Tersusunnya Laporan Pengelolaan dan Pengamatan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset sesuai ketentuan	Pemenuhan Seluruh Kewajiban Pelaporan Barang Milik Daerah Sesuai Perundang-undangan	(Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun / Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Di Targetkan) x 100%	Kasubbag Keuangan dan Aset	SEKRETARIAT
52	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	Pemenuhan Meningkatkan Kualitas Kepegawaian Perangkat Daerah	(Dokumen Kepegawaian pada Perangkat Daerah Tepat Waktu Tepat Mutu) X 100%	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawian	SEKRETARIAT
53	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas	Terpenuhinya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	(Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah) X 100%	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawian	SEKRETARIAT
54	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(Dokumen Laporan Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah) X 100%	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawian	SEKRETARIAT
55	Lancarnya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang berkualitas	Tersedianya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor Yang Terpenuhi	(Laporan jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor Yang Terpenuhi) X 100%	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawian	SEKRETARIAT
56	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana terpelihara Sesuai Kebutuhan yang berkualitas	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	(Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan) X 100%	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawian	SEKRETARIAT

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANJAR


Alhmad Bayhaqie, ST, MT

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690909 199703 1 013

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANJAR

NOMOR : 100.3.5.4 / 460 / DPRKPLH / 2025

TANGGAL : 22 September 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
FUNGSIONAL DAN PELAKSANA ASN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025**

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Definisi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
Urusan Lingkungan Hidup						
	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Data Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Pemantauan pada Sumber Pencemar di Tahun Berjalan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Pemantauan pada Sumber Pencemar di Tahun Berjalan	Pelaksana di Seksi Pembinaan Dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Tersedianya Data dan Informasi Kualitas Air dan Udara pada lokasi yang telah ditentukan di Tahun Berjalan	Jumlah Lokasi Pemantauan Kualitas Air dan Udara	Pelaksana di Seksi Pemantauan Dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Definsi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
	Beroperasi dan berfungsi alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Operasional dan Pemeliharaan Alat Pemantau Kualitas Air Secara Online, Kontinyu dan Otomatis (ONLIMO)	Jumlah Alat Pemantau Kualitas Air (ONLIMO yang telah dilakukan Pemeliharaan	Pelaksana di Seksi Pemantauan Dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Pelaksanaan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan Pelaksanaan pengelolaan laboratorium lingkungan, pelaksanaan pengujian sampel dari instansi pemerintah bidang lingkungan hidup dan instansi lainnya yang dapat ditanggung oleh APBD dan sampel dari dunia industri/dunia usaha, pengujian kualitas udara dan uji kualitas lingkungan, operasional laboratorium, termasuk kegiatan untuk peningkatan mutu atau standarisasi laboratorium lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Pelaksana di Seksi Pemantauan Dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil kordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Pelaksana di Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB8
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Definsi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	meningkatkan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Desa yang mengikuti Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pelaksana di Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB9
	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	meningkatkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi	Jumlah Kegiatan	Pelaksana di Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Terlaksananya Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Sanitary Landfill Di TPA	Jumlah Sampah Yang Tertangani Melalui Pemrosesan Akhir Sampah Di TPA/TPST Kabupaten/Kota Atau TPA/TPST Regional	Terlaksananya Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Sanitary Landfill Di TPA	Jumlah Sampah Yang Tertangani Melalui Pemrosesan Akhir Sampah Di TPA/TPST Kabupaten/Kota Atau TPA/TPST Regional	UPTD - Persampahan / Bidang PSLB3	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kegiatan pengadaan sarpras untuk TPA	Jumlah unit hasil pengadaan sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA Cahaya Kencana	UPTD - Persampahan / Bidang PSLB3	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Terlaksananya penanganan Sampah di TPA	Jumlah Timbulan sampah yang masuk di TPA	UPTD - Persampahan / Bidang PSLB3	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Terlaksananya Kerja Sama pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah	Terlaksananya pengelolaan sampah yang bekerjasama dengan BLUD Intan Hijau	Jumlah perusahaan atau badan usaha yang bekerjasama dengan BLUD Intan Hijau	UPTD - Persampahan / Bidang PSLB3	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Defnisi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
						Bidang PSLB3
	Terbentuknya Bank Sampah Induk	Jumlah Bank Sampah Induk Yang Terbentuk	Meningkatnya jumlah Bank Sampah Induk yang terbentuk	Jumlah Bank Sampah Induk Yang Terbentuk	Pelaksana Seksi Kemitraan Pengelolaan Sampah	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Terbentuknya Bank Sampah Unit	Jumlah Bank Sampah Unit Yang Terbentuk	Meningkatnya jumlah Bank Sampah Unit yang terbentuk	Jumlah Bank Sampah Unit Yang Terbentuk	Pelaksana Seksi Kemitraan Pengelolaan Sampah	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Terbentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelolaan Sampah	Jumlah KSM Yang Terbentuk	Meningkatnya jumlah KSM yang terbentuk	Jumlah KSM Yang Terbentuk	Pelaksana Seksi Kemitraan Pengelolaan Sampah	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Pelaksana Seksi Kemitraan Pengelolaan Sampah	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Terbentuknya Regulasi Persampahan	Jumlah Dokumen Regulasi Sampah	Dokumen regulasi persampahan yang di susun atau di revisi	Jumlah dokumen regulasi persampahan yang disusun, ditetapkan dan di revisi	Pelaksana Seksi Kemitraan Pengelolaan Sampah	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Sampah Di Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Sebagai Peserta Sosialisasi	Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Sampah Di Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Sebagai Peserta Sosialisasi	Pelaksana Seksi Kemitraan Pengelolaan Sampah	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Defnisi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Meningkatnya jumlah dokumen regulasi persampahan	Jumlah dokumen jaksrada yang di susun dan di tetapkan	Pelaksana Seksi Kemitraan Pengelolaan Sampah	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Meningkatnya kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan	Laporan hasil kegiatan jumlah pembatasan yang dilaksanakan	Pelaksana Seksi Kemitraan Pengelolaan Sampah	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	Meningkatnya kegiatan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali	Laporan hasil kegiatan melalui pemanfaatan kembali sampah	Pelaksana Seksi Kemitraan Pengelolaan Sampah	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Terlaksananya Proses Pemilahan Sampah	Jumlah Sampah Terpilah	Kegiatan pemilahan sampah	Jumlah sampah yang di pilah	Pelaksana Seksi Pengelolaan Sampah	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Sampah yang terangkut ke TPA	Jumlah sampah yang terangkut ke TPA melalui proses pengangkutan	Pelaksana Seksi Pengelolaan Sampah	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Definsi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
	Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	melakukan penangananan sampah melalui pengumpulan sampah	Jumlah desa yang memiliki bank sampah aktif : Jumlah seluruh desa di Kabupaten Banjar	Pelaksana Seksi Pengelolaan Sampah	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPSS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPSS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Seluruh kegiatan (baik mulai dari rencana, kebijakan, monitoring, pencatatan, dan evaluasi) untuk penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPSS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPSS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Pelaksana Seksi Pengelolaan Sampah	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Tersedianya Sarpras Pemilahan & Pengolahan Sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemilahan dan Pengolahan Sampah	Kegiatan pengadaan Sarpras Pemilahan & Pengolahan Sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemilahan dan Pengolahan Sampah	Pelaksana Seksi Pengelolaan Sampah	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Tersedianya Sarpras Pengumpulan & Pengangkutan Sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah	Kegiatan pengadaan Sarana dan Prasarana Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah	Pelaksana Seksi Pengelolaan Sampah	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan.	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan	Kegiatan pengadaan sarpras penanganan sampah	Jumlah unit hasil pengadaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Pelaksana Seksi Pengelolaan Sampah	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Definsi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
	Terlaksananya Verifikasi Persetujuan Rintek dan/atau Pertek	Jumlah Verifikasi Persetujuan Rintek dan/atau Pertek	Terlaksananya Verifikasi Persetujuan Rintek dan/atau Pertek	Jumlah Verifikasi Persetujuan Rintek dan/atau Pertek	Pelaksana Seksi Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Pelaksana Seksi Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Melakukan fasilitasi kesesuaian muatan rincian teknis dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kesesuaian muatan rincian teknis dengan peraturan perundang-undangan	Pelaksana Seksi Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3	Jumlah Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3 Yang Dibina	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3	Jumlah Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3 Yang Dibina	Pelaksana Seksi Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	Melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 terhadap pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 yang telah memiliki rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Pelaksana Seksi Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Defnisi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Rekomendasi Persetujuan Teknis (RPT) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh instansi lingkungan hidup sebagai persyaratan dalam pemberian Persetujuan Teknis (Pertek). Persetujuan Teknis sendiri merupakan dokumen yang menetapkan standar teknis dan batas baku dalam pengelolaan lingkungan bagi usaha/kegiatan tertentu.	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Fungsional Seksi Kajian Dampak Lingkungan	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang dibentuk	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Pendidikan, pelatihan dan pelantikan kepada PNS untuk menjadi pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup daerah yang bertugas mengawasi seluruh badan usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota serta pengawasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Pelaksana Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa Dan Penegakan Hukum Lingkungan	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Pelaksana Seksi Kajian Dampak Lingkungan	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Defnisi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
	Seluruh Perizinan Berusaha atau Peretujuan Pemerintah terkait Peretujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Seluruh Badan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Perizinan Berusaha atau Peretujuan Pemerintah terkait Peretujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi pada tahun (n)	Pelaksana Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa Dan Penegakan Hukum Lingkungan	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kasus lingkungan hidup yang dapat ditangani dan terselesaikan	Jumlah Sengketa lingkungan hidup yang dapat ditangani dan terselesaikan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Pelaksana Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa Dan Penegakan Hukum Lingkungan	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	Laporan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan permasalahan dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	Pelaksana Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa Dan Penegakan Hukum Lingkungan	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Pelaksanaan penegakkan sanksi administratif kepada pelaku usaha atau penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penanggung jawab/pelaku usaha yang tidak taat yang diberikan sanksi administrasi	Pelaksana Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa Dan Penegakan Hukum Lingkungan	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Pelaksana Seksi Kajian Dampak Lingkungan	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Definisi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
	Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen KLHS RPJMD (Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah dokumen yang berisi analisis dampak kebijakan, rencana, dan program dalam RPJMD terhadap lingkungan hidup, guna memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam perencanaan daerah.	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Pelaksana Seksi Kajian Dampak Lingkungan	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	KLHS RDTR adalah dokumen yang berisi kajian lingkungan hidup strategis untuk memastikan bahwa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dokumen ini digunakan sebagai alat analisis untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dalam perencanaan tata ruang secara lebih rinci.	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Pelaksana Seksi Kajian Dampak Lingkungan	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Dokumen mengenai Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen Hasil pada tahun(n)	Fungsional Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Defnisi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen mengenai sekolah yang mendapatkan pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dana Berbudaya Lingkungan Hidup baik dalam acara sosialisasi, koordinasi, maupun kunjungan langsung.	Jumlah dokumen mengenai sekolah yang mendapatkan pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dana Berbudaya Lingkungan Hidup baik dalam acara sosialisasi, koordinasi, maupun kunjungan langsung dalam tahun (n)	Pelaksana Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Dan Pemeliharaan Lingkungan	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Terselenggaranya Kegiatan Rehabilitasi Lahan Di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Lahan Di Luar Kawasan Hutan	Rehabilitasi Lahan Ruang Terbuka Hijau Dalam Kota Berupa Pemeliharaan Rutin dan Penanaman	Jumlah Kegiatan	Pelaksana Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Dan Pemeliharaan Lingkungan	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Meningkatnya Penanaman Pohon di Luar Kawasan Hutan	Persentase Tingkat Hidup Pohon Yang Ditanam	Tingkat Hidup Pohon Yang Ditanam	(Jumlah Pohon Ditanam - Jumlah Pohon Yang Mati) / Jumlah Pohon Di Tanam x 100%	Pelaksana Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Dan Pemeliharaan Lingkungan	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Meningkatnya kesadaran orang/masyarakat untuk mengelola keanekaragaman hayati	Jumlah orang yang mengelola keanekaragaman hayati	Pelaksana Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Dan Pemeliharaan Lingkungan	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati	Peningkatan pengelolaan taman keanekaragaman hayati	Pelaksana Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Dan Pemeliharaan Lingkungan	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Defnisi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
	Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan Taman Kehati 7.82 Ha	Peningkatan pengelolaan taman keaneekaragaman hayati	Pelaksana Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Dan Pemeliharaan Lingkungan	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Tertindakannya Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah Ruang Terbuka Hijau Yang Terbangun	Tertindakannya Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah Ruang Terbuka Hijau Yang Terbangun	Pelaksana Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Dan Pemeliharaan Lingkungan	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Tertindakannya Pemeliharaan RTH	Jumlah Ruang Terbuka Hijau Yang Terpelihara	Tertindakannya Pemeliharaan RTH	Jumlah Ruang Terbuka Hijau Yang Terpelihara	Pelaksana Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Dan Pemeliharaan Lingkungan	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah luasan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kabupaten Banjar	Luas Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	Pelaksana Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Dan Pemeliharaan Lingkungan	Bidang P2KL, Bidang P3KL, dan Bidang PSLB3
Urusan Perumahan Kawasan Permukiman						
	Tertindakannya Perencanaan Perbaikan Jalan Lingkungan	Jumlah Perencanaan Jalan Lingkungan	Tertindakannya Perencanaan Perbaikan Jalan Lingkungan	Jumlah Perencanaan Jalan Lingkungan	Pelaksana Seksi Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan	Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan
	Tertindakannya Perbaikan Jalan Lingkungan	Jumlah Perbaikan Jalan Lingkungan	Tertindakannya Perbaikan Jalan Lingkungan	Jumlah Perbaikan Jalan Lingkungan	Pelaksana Seksi Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan	Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Definsi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
	Terlaksananya Perencanaan Perbaikan Drainase	Jumlah Perencanaan Drainase	Terlaksananya Perencanaan Perbaikan Drainase	Jumlah Perencanaan Drainase	Pelaksana Seksi Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan	Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan
	Terlaksananya Perbaikan Drainase	Jumlah Perbaikan Drainase	Terlaksananya Perbaikan Drainase	Jumlah Perbaikan Drainase	Pelaksana Seksi Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan	Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Terlaksananya hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan	Pelaksana Seksi Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan	Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan
	Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Terlaksananya lokasi PSU perumahan yang dilaksanakan perbaikan	Jumlah lokasi PSU Perumahan yang telah dilaksanakan perbaikan	Pelaksana Seksi Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan	Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan
	Terlaksananya Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Terpenulihnya Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Pelaksana Seksi Keterpaduan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan	Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan
	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Kegiatan survey dan pemeriksaan kondisi eksisting, pematangan lahan, perencanaan dan DED, pengadaan barang/jasa, pelaksanaan konstruksi pembangunan PSU perumahan, serah terima. PSU Perumahan adalah PSU yang melayani satu lingkungan perumahan yang terintegrasi dengan sistem atau	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Pelaksana Seksi Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan	Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Definsi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
			<p>jaringan perkotaan. Yang termasuk PSU Perumahan adalah 1) Prasarana perumahan antara lain: a. jaringan jalan, b. jaringan saluran pembuangan air hujan atau drainase, c. penyediaan air minum, d. saluran pembuangan air limbah atau sanitasi, dan e. prasarana dan sarana 2) Sarana perumahan antara lain: a. sarana perniagaan, b. sarana pelayanan umum, c. sarana pendidikan, d. sarana peribadatan, e. sarana sosial, f. sarana rekreasi dan olah raga, g. sarana tempat bermain, h. sarana pertamanan dan ruang terbuka, dan i. sarana 3) Utilitas perumahan antara lain: a. jaringan listrik, b. jaringan air, c. jaringan gas, d. jaringan telekomunikasi, e. jaringan, f. pemadam kebakaran, dan g. sarana penerangan jalan umum. Perumahan adalah kawasan dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) sampai dengan 1000 (seribu) rumah.</p>			
	<p>Terlaksananya Verifikasi PSU yang Akan Diserah terimakan Oleh Pengembang</p>	<p>Jumlah PSU yang Diverifikasi</p>	<p>Jumlah PSU yang diserah terimakan sesuai dengan verifikasi</p>	<p>Jumlah PSU yang telah diserah terimakan</p>	<p>Pelaksana Seksi Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan</p>	<p>Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan</p>

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Definsi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
	Terlaksanannya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembangan	Terlaksanannya Verifikasi dan Penyerahan PSU sesuai dengan siteplan	Jumlah PSU yang telah diverifikasi	Pelaksana Seksi Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan	Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan
	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Terdatanya Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Pelaksana Seksi Penyediaan Perumahan Swadaya	Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan
	Tersusunnya Dokumen Data perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Teridentifikasi perumahan di lokasi rawan bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pelaksana Seksi Penyediaan Perumahan Swadaya	Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan
	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Jumlah Rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan Rencana Aksi	Jumlah Rumah yang terhabilitasi akibat bencana	Pelaksana Seksi Penyediaan Perumahan Swadaya	Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan
	Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pelaksana Seksi Penyediaan Perumahan Swadaya	Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan
	Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan oleh pelaku pembangunan untuk penerbitan izin	Jumah Dokumen	Pelaksana Seksi Penyediaan Perumahan Umum Dan Komersil	Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan
	Terlaksanannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi perumahan yang dilakukan pemantauan	Jumlah Laporan	Pelaksana Seksi Penyediaan Perumahan Umum Dan Komersil	Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Definsi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
	Tersusun /Tereview /Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun /Tereview /Terlegalisasi	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun /Tereview /Terlegalisasi	Jumlah Dokumen	Pelaksana Seksi Pendataan Dan Perencanaan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan
	Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen data dan dokumen perencanaan di lokasi kawasan permukiman kumuh	Jumlah Dokumen	Pelaksana Seksi Pendataan Dan Perencanaan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan
	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah Rumah tidak Layak Huni yang diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak layak Huni Yang Diperbaiki	Pelaksana Seksi Penyediaan Perumahan Swadaya	Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan
	Terlaksananya Perencanaan Perbaikan Jalan Lingkungan	Jumlah Perencanaan Jalan Lingkungan	Terlaksananya Perencanaan Perbaikan Jalan Lingkungan	Jumlah Perencanaan Jalan Lingkungan	Pelaksana Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman	Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan
	Terlaksananya Perbaikan Jalan Lingkungan	Jumlah Perbaikan Jalan Lingkungan	Terlaksananya Perbaikan Jalan Lingkungan	Jumlah Perbaikan Jalan Lingkungan	Pelaksana Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman	Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan
	Terlaksananya Perencanaan Perbaikan Drainase	Jumlah Perencanaan Drainase	Terlaksananya Perencanaan Perbaikan Drainase	Jumlah Perencanaan Drainase	Pelaksana Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman	Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan
	Terlaksananya Perbaikan Drainase	Jumlah Perbaikan Drainase	Terlaksananya Perbaikan Drainase	Jumlah Perbaikan Drainase	Pelaksana Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman	Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Defnisi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan	Pelaksana Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman	Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan
	Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Luas Ha Yang Dipugar	Pelaksana Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman	Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan
	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya yang berada diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	Pelaksana Seksi Penyediaan Perumahan Swadaya	Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Definsi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	<p>Pembangunan Rumah Layak Huni di luar kawasan kumuh, yang memenuhi prasyarat keselamatan bangunan dan mencakup minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Keselamatan bangunan meliputi struktur bawah / struktur tengah/kolom dan balok dan struktur atas. Kesehatan meliputi pencahayaannya, penghawaan, air minum, dan sanitasi. Kecukupan luas minimum 7,2 m² sampai 12 m² /orang. Penyediaan rumah baru layak huni dapat berbentuk vertikal (susun), rumah tapak. Pembangunan rumah baru layak huni dipertuntukan untuk pencegahan kawasan kumuh sesuai dengan kewenangan daerah termasuk rumah swadaya dan rumah khusus (rumah khusus selain untuk korban bencana, relokasi sesuai dengan kebutuhan khusus lainnya sesuai dengan program pemerintah daerah). Pengadaan lahan, pematangan lahan, penyusunan site plan/detail engineering design (DED) dan aktivitas sejenis dapat masuk dalam sub kegiatan ini.</p>	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	Pelaksana Seksi Penyediaan Perumahan Swadaya	Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan
	Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyardaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyardaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti	Pelaksana Seksi Pendataan Dan Perencanaan	Bidang Perumahan Rakyat dan

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Definsi Operasional	Formulasi	Penanggunjawab	Dumber Data
					Kawasan Permukiman	Bidang Kawasan
Sekretariat						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Renstra, Renja, Rencana Aksi, Rencana Strategis, Pohon Kinerja, Cascading	Jumlah Dokumen	Fungsional Sub Bagian Perencanaan	Sekretariat
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPPD	Dokumen RKA-SKPPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPPD	Jumlah Dokumen	Fungsional Sub Bagian Perencanaan	Sekretariat
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPPD	Jumlah Dokumen	Fungsional Sub Bagian Perencanaan	Sekretariat
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPPD	Dokumen DPA-SKPPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPPD	Jumlah Dokumen	Fungsional Sub Bagian Perencanaan	Sekretariat
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPPD	Jumlah Dokumen	Fungsional Sub Bagian Perencanaan	Sekretariat
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPPD	Jumlah Laporan	Fungsional Sub Bagian Perencanaan	Sekretariat
	Tertindakannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Fungsional Sub Bagian Perencanaan	Sekretariat


No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Definsi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen	Fungsional Sub Bagian Perencanaan	Sekretariat
	Tertindakannya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data	Fungsional Sub Bagian Perencanaan	Sekretariat
	Tertindakannya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	Fungsional Sub Bagian Perencanaan	Sekretariat
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	Pelaksana Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sekretariat
	Tertindakannya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen	Pelaksana Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sekretariat
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan	Jumlah Laporan	Pelaksana Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sekretariat
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan	Pelaksana Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sekretariat

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Definsi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen	Pelaksana Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sekretariat
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen	Pelaksana Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sekretariat
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen	Pelaksana Sub Bagian Umum Dan Kepegawian	Sekretariat
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang	Pelaksana Sub Bagian Umum Dan Kepegawian	Sekretariat
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang	Pelaksana Sub Bagian Umum Dan Kepegawian	Sekretariat
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket	Pelaksana Sub Bagian Umum Dan Kepegawian	Sekretariat
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket	Pelaksana Sub Bagian Umum Dan Kepegawian	Sekretariat
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket	Pelaksana Sub Bagian Umum Dan Kepegawian	Sekretariat
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket	Pelaksana Sub Bagian Umum Dan Kepegawian	Sekretariat
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket	Pelaksana Sub Bagian Umum Dan Kepegawian	Sekretariat

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Definsi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen	Pelaksana Sub Bagian Umum Dan Kepegawian	Sekretariat
	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan	Pelaksana Sub Bagian Umum Dan Kepegawian	Sekretariat
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Pelaksana Sub Bagian Umum Dan Kepegawian	Sekretariat
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit	Pelaksana Sub Bagian Umum Dan Kepegawian	Sekretariat
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit	Pelaksana Sub Bagian Umum Dan Kepegawian	Sekretariat
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Unit	Pelaksana Sub Bagian Umum Dan Kepegawian	Sekretariat
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit	Pelaksana Sub Bagian Umum Dan Kepegawian	Sekretariat
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit	Pelaksana Sub Bagian Umum Dan Kepegawian	Sekretariat
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan	Pelaksana Sub Bagian Umum Dan Kepegawian	Sekretariat
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan	Pelaksana Sub Bagian Umum Dan Kepegawian	Sekretariat

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Definsi Operasional	Formulasi	Penanggungjawab	Dumber Data
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan	Pelaksana Sub Bagian Umum Dan Kepegawian	Sekretariat
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Unit	Pelaksana Sub Bagian Umum Dan Kepegawian	Sekretariat
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Unit	Pelaksana Sub Bagian Umum Dan Kepegawian	Sekretariat
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Unit	Pelaksana Sub Bagian Umum Dan Kepegawian	Sekretariat
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Jumlah Unit	Pelaksana Sub Bagian Umum Dan Kepegawian	Sekretariat

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANJAR


Akhmad Bayhaqie, ST, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690909 199703 1 013